

**IMPLEMENTASI PROGRAM LAYANAN INOVASI
PUSTAKA ANAK BANGSA OLEH DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH DI KOTA
SAMARINDA**

Mutiara Anwar, Kus Indarto

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 3, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Program Layanan Inovasi Pustaka Anak Bangsa oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah di Kota Samarinda.

Pengarang : Mutiara Anwar

NIM : 1802015056

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 7 Oktober 2025

Pembimbing,



Dr. Kus Indarto, M.AP
NIP 19740401 200604 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik

Volume : 13

Nomor : 3

Tahun : 2025

Halaman : 672-684

IMPLEMENTASI PROGRAM LAYANAN INOVASI PUSTAKA ANAK BANGSA OLEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH DI KOTA SAMARINDA

Mutiara Anwar ¹, Kus Indarto ²

Abstrak

Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah meluncurkan program Inovasi Pustaka Anak Bangsa sebagai Inovasi layanan literasi bagi anak-anak panti soisial yang memiliki keterbatasan akses terhadap bahan bacaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program tersebut serta mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan Teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi analisis data yang digunakan ialah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan sikap pelaksana sudah berjalan baik sementara faktor penghambat terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas seperti mobil perpustakaan keliling. Program ini dinilai cukup efektif sebagai inovasi layanan publik, namun perlu beberapa perbaikan pada aspek sumber daya manusia dan dukungan sarana agar dapat memberikan dampak yang optimal.

Kata Kunci : *Implementasi, Inovasi Pustaka Anak Bangsa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah*

Pendahuluan

Membaca adalah fondasi dari kemajuan intelektual individu dan bangsa. Namun, data menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam bidang literasi. Hasil survei PISA menunjukkan bahwa mayoritas peserta didik Indonesia memiliki kemampuan di bawah standar minimum, khususnya dalam membaca, matematika, dan IPA (Syahril, 2020). UNESCO bahkan mencatat bahwa tingkat minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001, atau satu orang dari seribu yang memiliki minat baca tinggi. Tantangan ini juga dirasakan di Kalimantan Timur. Hasil kajian Perpustakaan Nasional RI tahun 2021 mencatat bahwa indeks literasi di provinsi ini berada pada angka 22,42 (kategori rendah), meskipun indeks kegemaran membaca tergolong tinggi. Kota Samarinda sebagai ibu kota provinsi turut merasakan rendahnya minat baca, khususnya pada kelompok anak-anak panti sosial dan panti asuhan yang sering kali luput dari

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Mutiaraanwar1100@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

akses layanan literasi yang memadai. Menanggapi hal ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Samarinda meluncurkan Program Layanan Inovasi Pustaka Anak Bangsa, yaitu layanan perpustakaan keliling yang secara khusus menysasar anak-anak panti. Program ini tidak hanya menyediakan bahan bacaan, tetapi juga aktivitas literasi seperti pembacaan dongeng, film edukatif, dan kreativitas lainnya. Program ini merupakan implementasi dari berbagai kebijakan nasional dan daerah, seperti UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, serta Pergub Kaltim No. 43 Tahun 2023. Meski demikian, dalam pelaksanaannya program ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan SDM, fasilitas mobil pusling yang sudah tua, hingga bahan bacaan yang belum sesuai dengan usia dan minat anak-anak panti. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji implementasi layanan ini sebagai bentuk inovasi pelayanan publik yang berkontribusi terhadap peningkatan literasi anak di Samarinda serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam berjalannya program ini.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut Dye seperti yang dikutip oleh Yulianto dan Subianto (2015) adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan berarti bahwa setiap gerakan pemerintah, baik implisit atau pun eksplisit adalah bagian dari kebijakan, pengertian ini berarti bahwa kebijakan dilaksanakan oleh lembaga atau instansi pemerintah dan kebijakan mencakup pilihan-pilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Selanjutnya Anderson (1979) mengungkapkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian aktivitas dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor untuk memecahkan masalah tertentu. Sejalan dengan Anderson (1979), Woll mendefinisikan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan pemerintah guna memecahkan sebuah masalah yang terjadi pada masyarakat baik secara langsung atau pun menggunakan berbagai macam lembaga yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan yang direncanakan atau serangkaian keputusan kebijaksanaan mencakup pilihan alternatif atau pilihan kebijakan untuk menjadi pemecah suatu masalah yang terjadi di masyarakat dan dilakukan oleh aktor atau sekelompok aktor di pemerintah secara langsung atau menggunakan berbagai macam lembaga yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang penting karena melalui prosedur inilah suatu masalah di masyarakat bisa diselesaikan atau tidak dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada sehingga pada akhirnya

kebijakan dapat berjalan dengan baik dan memiliki hasil yang baik pula. Dalam implementasi kebijakan publik ada beberapa model yaitu :

1. Model Van Meter dan Van Horn
Model ini menegaskan bahwa "implementasi kebijakan dimulai sejalan dengan kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik". Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik dalam model ini ialah :
 - a. Ukuran dan tujuan kebijakan
 - b. Sumber daya
 - c. Karakteristik agen pelaksana
 - d. Disposisi
 - e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
 - f. Lingkungan ekonomi, soisial dan publik
2. Model Jan Merse
Jan Merse berpendapat bahwa model implementasi dipengaruhi beberapa faktor yaitu
 - a. Informasi
 - b. Isi kebijakan
 - c. Dukungan masyarakat (fisik dan nonfisik)
 - d. Pembagian potensi
3. Model Mazmanian dan Sabatier
Model ketiga yang ditawarkan oleh Mazmanian dan Ssabatie yang berpendapat bahwa "Implementasi kebijakan adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan". Mazmanian dan Sabatier, mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam 3 variabel yaitu :
 - a. Variabel Independent, mudah atau tidaknya pengendalian masalah berkaitan dengan masalah pelaksanaan teoritis dan teknis, berbagai objek dan indikator perubahan yang diinginkan
 - b. Variabel Intervening, kapasitas kebijakan dalam menyusun proses implementasi dengan indikator kejelasan dan koherensi tujuan.
 - c. Variabel Dependen, tahapan proses implementasi, pemahaman lembaga pelaksana berupa penyusunan pedoman pelaksanaan, ketaatan pada tujuan, hasil nyata, penerimaan hasil konkrit, revisi pedoman yang dikembangkan dan dilaksanakan atau pedoman dasar.

Model Implementasi menurut Edward III

Penelitian ini berdasarkan pada teori implementasi kebijakan public, khususnya model implementasi dari George Edward III yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable utama, yaitu:

1. Komunikasi
Komunikasi yang efektif sangat menentukan tercapainya tujuan kebijakan, informasi yang disampaikan kepada pelaksana harus jelas, konsisten, dan dapat diterima tanpa distorsi, sehingga setiap aktor dalam implementasi memahami

tugasnya dengan baik. Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi ialah :

Transmisi menurut Edward III dalam Agustino (2020:154) menyatakan faktor pertama yang berpengaruh pada komunikasi kebijakan adalah transmisi atau penyaluran komunikasi. Transmisi adalah proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan sehingga para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang mereka akan lakukan. Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula.

Kejelasan Menurut Edward III dalam Winarno (2014:180) kejelasan komunikasi akan menentukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dimensi kejelasan menginginkan agar kebijakann tersebut dikomunikasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas dan mudah dipahami sehingga mereka semua mengetahui maksud, tujuan dan sasaran tersebut sehingga dapat mempersiapkan serta melaksanakannya dengan baik, efektif dan efisien.

Konsistensi, menurut Edward III dalam Agustino (2020:138) Jika implementasi kebijakan ingin berjalan efektif maka perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini dikarenakan jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan yang baik menurut Edward III (Agustino,2006) karena meskipun kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersebut maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, yaitu

Sumber daya manusia (staf yang kompeten dibidangnya) menurut Edward III (Widodo, 2007) menyatakan bahwa kegagalan yang sering terjadi dalam implementasikebijakan salah satunya disebabkan sumber daya manusia yang tidak mencukupi, memadai, atau pun tidak kompeten dalam bidangnya penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, akan tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan.

Sumber daya anggaran, implementasi kebijakan tidak dapat berjalan baik tanpa adanya dukungan dari anggaran. Sebagaimana yang disampaikan dari Edward III (2010:100) menyatakan bahwa terbatasnya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pada kebijakan. Selain kebijakan tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran juga akan menyebabkan disposisi pelaksana kebijakan rendah. **Fasilitas**, dukungan fasilitas yang memadai dapat memudahkan para implementor menjalankan kebijakan dengan

efektif dan efisien. Seperti yang dikatakan Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu fasilitas yang berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

Kewenangan yang ada dalam instansi pemerintahan menjadikan instansi yang dimiliki oleh seseorang atau pimpinan menjadi mudah untuk diarahkan dan diatur sesuai dengan tujuan bersama. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa pelaksana utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri dalam melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya. Kewenangan dalam suatu pelaksanaan kebijakan dalam suatu lembaga atau instansi pemerintahan merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh lembaga pemerintah sebagai pelaksana kebijakan

3. Disposisi (sikap pelaksana)

Disposisi atau sikap para pelaksana dari suatu kebijakan akan sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Karena sikap pelaksanaan dalam hal ini aparatur suatu instansi adalah implementor dari suatu kebijakan. Sebagaimana yang dikatakan Edward III dalam Indiahono (2009:32) disposisi yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan. Jika pelaksana memahami dan mendukung kebijakan, maka pelaksanaan program akan berjalan efektif.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam Winarno (2014:206) terdapat dua karakteristik utama yang menjadi faktor pendorong atau indikator keberhasilan dari birokrasi yaitu :

Standart Operating Procedur (SOP) atau penetapan prosedur sebagai dasar dan standar para pelaksana untuk menjalankan kebijakan. Menurut Edward III dalam Agustino (2020:158) menyatakan bahwa SOP adalah prosedur atau aktifitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai atau (pelaksana kebijakan contohnya seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Fragmentasi adalah penebaran tanggung jawab pada satu lingkup kebijakan diantara beberapa unit organisasi. sesuai dengan pendapat Edward III dalam Winarno (2014:209) menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi program layanan inovasi Pustaka Anak Bangsa oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah di Kota Samarinda. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan program

serta faktor- faktor penghambatnya, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan model George C, Edward III.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai implementasi program layanan pustaka keliling pada anak-anak panti, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Fokus Penelitian

Penelitian difokuskan pada empat variabel utama implementasi menurut model George C. Edward III, yaitu:

1. Komunikasi: transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi
2. Sumber daya: staf, anggaran, fasilitas, dan kewenangan
3. Disposisi pelaksana
4. Struktur birokrasi: SOP dan Fragmentasi

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti faktor penghambat pelaksanaan program di lapangan.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui:

1. **Wawancara** melakukan tanya jawab atau wawancara dengan kepala dinas, kepala bidang layanan, pustakawan pelaksana program, dan warga binaan panti
2. **Observasi** langsung saat pelaksanaan layanan pustaka keliling
3. **Dokumentasi**, seperti SK pelaksanaan program, foto kegiatan, dan SOP 4

Sumber Data

1. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari hasil obeservasi terhadap situasi atau data yang diperoleh dari tangan pertama atau subjek (informan) yang dilakukan dengan proses wawancara oleh peneliti.
2. Data sekunder diartikan sebagai data-data yang digunakan oleh peneliti dimana berfungsi sebagai data-data pendukung atau pelengkap data utama. Data sekunder ini meliputi dokumen resmi, laporan kegiatan, dan referensi peraturan yang relevan.

Teknik Analisi Data

Penelitian ini menggunakan model analisis Miles, Huberman & Saldana, dengan tiga tahapan :

1. Kondensasi data: memilah data penting sesuai dengan focus penelitian
2. Penyajian data: menampilkan data dalam narasi deskriptif
3. Penarikan Kesimpulan: menemukan pola dan makna terhadap implementasi program.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi program layanan inovasi Pustaka Anak Bangsa oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kota Samarinda telah dilaksanakan

sejak tahun 2021. Program ini menyasar anak-anak di tiga panti sosial di bawah naungan Dinas Sosial Kalimantan Timur, dengan kegiatan berupa layanan perpustakaan keliling, dongeng, pemutaran film edukatif, hingga bimbingan konseling. Berikut ini adalah hasil temuan berdasarkan fokus penelitian:

1. Komunikasi

Komunikasi menurut Edward III (Nugroho, 2009) mempunyai tiga indikator yang pertama yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Transmisi dalam Inovasi Pustaka Anak Bangsa ini yaitu penyampaian informasi atau transmisi.

- a) Transmisi menurut Edward III salam Agustino (2020:154) menyatakan bahwa penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Transmisi adalah penyaluran komunikasi di lapangan menunjukkan bahwa penyampain pesan melalui rapat internal yang diadakan oleh pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dan diskusi antar pustakawan untuk mengetahui tugas yang harus dijalankan di lapangan sehingga dapat disimpulkan bahwa transmisi pada program ini berjalan dengan baik. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafis Aldani (2020) menyatakan bahwa para pelaksanan kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, pada penelitian ini aspek transmisi pada komunikasi ini dapat dilihat bagaimana Kepala Dinas Perpustakaan menginformasikan kepada para pihak terkait dalam program ini melalui rapat internal, diskusi dan melalui media sosial.
- b) Kejelasan menurut Edward III dalam Winarno (2014:180) kejelasan komunikasi akan menentukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Kejelasan komunikasi dalam Implementasi Program Layanan Inovasi Pustaka Anak Bangsa ini dari penyampaian informasi oleh para pustakawan kepada masyarakat sebelum ke masyarakat para pustakawan juga melakukan rapat terlebih dahulu untuk memastikan para pelaksana mengetahui dengan jelas apa yang akan dilakukan, tidak hanya rapat biasanya para pustakawan bahkan melakukan diskusi kecil kepada seluruh staf disela waktu senggang mereka. Maka dari itu bentuk penyampaian informasi kepada para pelaksana agar informasi tersampaikan dengan jelas maka dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Kejelasan penyampaian informasi yang dilakukan oleh pembuat keputusan kepada para pelaksana seperti pihak pustakawan sudah tersampaikan dengan jelas dan baik. Sama halnya dengan penelitian Ely Sukmana (2022) ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan memungkinkan bertentangan dengan pesan diawal.
- c) Konsistensi menurut Edward III dalam Agustino (2020:138) jika implementasi kebijakan ingin berjalan efektifmaka perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkn dan dijalankan). Ini dikarenakan jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah,

maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Konsisten dalam penyampaian informasi dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah tersampaikan. Dapat dilihat bahwa pihak pelaksana yaitu para pustakawan rutin melakukan kunjungan ke setiap panti sebulan dua kali. Dalam penyampaian perintah tugas pun yang dilakukan para pustakawan akan dilakukan rapat internal terlebih dahulu sebelum menjalankan suatu kegiatan. Sama halnya dengan penelitian Dwiyanti (2020) menyatakan bahwa konsisten merupakan tindakan yang dilakukan terus menerus untuk mencapai tujuan. Konsistensi terdiri dari konsistensi komunikasi kebijakan dan keberlanjutan pelaksanaan komunikasi kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan yang baik menurut Edward III (Agustino,2006) karena meskipun kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersebut maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran/dana, sumber daya fasilitas dan sumber daya kewenangan. Adapun keempat indikator dalam faktor sumber daya yang terdapat dalam penelitian sebagai berikut

a) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia faktor yang sangat dominan dalam setiap pelaksanaan kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi salah satunya disebabkan sumber daya manusia yang tidak mencukupi, memadai, dan berkompeten di bidangnya. Pada penelitian ini ketersediaan sumber daya manusia masih menjadi kendala utama dalam Inovasi Pustaka Anak Bangsa ini terutama sumber daya manusianya, jumlah pustakawan yang terlibat dalam program ini sangat terbatas, sering kali hanya 2–3 orang per kunjungan dan staf yang bertugas belum berkompeten di bidangnya. terkait dengan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan ini masih belum mencukupi dan memadai dari segi kualitas dan kuantitasnya. Ketersediaan jumlah pelaksana oleh pihak pustakawan yang masih kurang jika dibandingkan dengan para warga binaan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Harmayani dan Nursifa (2024) menyatakan bahwa faktor sumber daya mempunyai faktor yang sangat penting, ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan. Implementasi tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas.

b) Anggaran, implementasi kebijakan tidak dapat berjalan baik tanpa adanya dukungan dari anggaran. Sebagaimana yang disampaikan dari Edward III (2010:100) menyatakan bahwa terbatasnya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pada kebijakan. Selain kebijakan tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran juga akan menyebabkan disposisi pelaksana kebijakan rendah. Pustakawan memperoleh anggaran dari APBD sebagai

penunjang segala kegiatan yang dilakukan oleh para pustakawan seperti uang bensin mobil perpustakaan keliling, uang minum dan uang makan, serta peralatan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan program inovasi layanan pustaka anak bangsa. Meskipun memperoleh anggaran dari APBD, namun tidak semua dapat dicover seperti pemeliharaan mobil dan pengadaan buku baru. Sehingga dapat dikatakan bahwa sumber daya anggaran dalam pelaksanaan kebijakan ini masih cukup terbatas dan belum berjalan dengan baik.

- c) Fasilitas, dukungan fasilitas yang memadai dapat memudahkan para implementor menjalankan kebijakan dengan efektif dan efisien. Seperti yang dikatakan Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu fasilitas yang berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan layanan inovasi pustaka anak bangsa ini merupakan salah satu hal yang penting dalam menjamin mutu layanan inovasi pustaka anak bangsa. Sumber daya peralatan yaitu sarana dan prasarana yang ada dalam kebijakan layanan inovasi pustaka anak bangsa ini berupa mobil perpustakaan keliling yang dilengkapi dengan audio visual lalu ada juga bahan bahan bacaan. Namun, berdasarkan hasil penelitian terkait dengan sarana dan prasarana kebijakan ini masih kurang. Seperti kurangnya bahan bacaan yang sesuai dengan umur para warga binaan, sehingga terkadang para warga binaan seringkali bingung harus membaca apa karena banyak yang tidak sesuai dengan umur mereka banyak dari buku-buku tersebut tentang buku mata pelajaran kuliah atau tentang perekonomian dunia yang para warga binaan tentu saja belum mengerti akan hal itu dan buku-buku yang sesuai umur mereka hanya tersedia sedikit hal ini pun membuat para warga binaan harus bergantian membaca karena sedikitnya bahan bacaan yang sesuai dengan umur mereka. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti (2020) menyatakan bahwa, fasilitas merupakan faktor yang sangat penting untuk melaksanakan kebijakan, kurangnya fasilitas yang tersedai dapat menghambat berjalannya suatu kebijakan.
- d) Kewenangan, menurut Edward III (Widodo, 2010) menyatakan bahwa pelaksana utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri dalam melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya. Implementasi program layanan inovasi pustaka anak bangsa di Kota Samarinda untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang ditentukan. Kewenangan sudah diberikan kepada para setiap pelaksana yang berada di program ini, kewenangan yang diberikan kepada para pustakawan ada yang berbentuk lisan dan tertulis. Dalam program ini ada yang menjadi tim survey yang akan turun ke lapangan dan tim pengaduan yang menerima keluhan atau aduan dari masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan ini juga pihak pustakawan berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Adapun pihak-pihak terkait memiliki wewengannya masing-masing. Seperti pihak Dinas Sosial

sebagai akses utama para pustakawan untuk melakukan kesepakatan terhadap panti-panti untuk melakukan program layanan inovasi pustaka anak bangsa di tempat tersebut. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh para pustakawan sebagai pelaksana utama kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik karena wewenangnya sudah jelas dan diatur dalam peraturan yang ada.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi atau sikap para pelaksana dari suatu kebijakan akan sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Sebagaimana yang dikatakan Edward III dalam Indiahono (2009:32) disposisi yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan. Disposisi dalam penelitian ini berkaitan dengan sikap komitmen. Para pustakawan telah memperlihatkan komitmen dalam melaksanakan program layanan inovasi pustaka anak bangsa ini. Sikap pustakawan sebagai pelaksana utama menunjukkan sikap sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas maupun kewenangan yang menjadi tanggung jawab mereka. Melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para pustakawan dengan cara memberi perhatian kecil kepada para warga binaan seperti para pustakawan akan melakukan kunjungan setiap 2 kali sebulan dan durasi 3 jam diluar jam perjalanan para pustakawan juga membawakan snack atau mainan untuk para warga binaan serta mengadakan story telling untuk menghibur para warga binaan sehingga para warga binaan tidak merasa bosan hanya dengan aktivitas membaca. Mereka bahkan menambahkan kegiatan tambahan seperti membawa snack dan mainan agar pendekatan ke anak-anak lebih menyenangkan. Komitmen ini menunjukkan adanya dukungan internal yang kuat terhadap tujuan program. Dapat disimpulkan bahwa disposisi terhadap kebijakan layanan inovasi pustaka anak bangsa ini berjalan dengan baik melihat komitmen yang sangat tinggi dari para pustakawan selaku pelaksana utama kebijakan

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam Winarno (2014:206) terdapat dua karakteristik utama yang menjadi faktor pendorong atau indikator keberhasilan dari birokrasi yaitu

- a) *Standart Operating Procedur* (SOP) Menurut Edward III dalam Agustino (2020:158) menyatakan bahwa SOP adalah prosedur atau aktifitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai atau (pelaksana kebijakan contohnya seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. *Standart Operating Procedures* (SOP) sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya yaitu tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Penjabaran lebih lanjut dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Harmani dan Nursifa (2024) bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan prosedur atau pola yang mengatur jalannya pekerjaan dari implementasi kebijakan. Prosedur atau aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan harus diikuti dan ditaati oleh para pelaksana kebijakan atau implementor itu sendiri.

- b) Fragmentasi, Fragmentasi adalah penebaran tanggung jawab pada satu lingkup kebijakan diantara beberapa unit organisasi. sesuai dengan pendapat Edward III dalam Winarno (2014:209) menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Dalam pelaksanaannya terjalin koordinasi antar para pelaksana kebijakan yaitu para pustakawan yang sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing seperti pembagian tugas terhadap masing-masing pustakawan. Dalam kebijakan layanan inovasi pustaka anak bangsa ini terdapat beberapa tim yang mempunyai peran spesifik, seperti bagian pelayanan yang bertanggung jawab dalam memberikan informasi dan layanan secara langsung kepada masyarakat. Tim survey yang bertugasturun ke lapangan untuk melakukan pengamatan serta pengumpulan data secara langsung, lalu ada bagian penanganan dan pengaduan yang berperan dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat dan memastikan solusi yang tepat. Selain itu, terdapat pulan tim yang menangani sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran operasional keseluruhan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Harmani dan Nursifa (2024) dalam pelaksanaan suatu kebijakan sering terjadi penyebrang tanggung jawab atau fragmentasi diantara beberapa unit kerja maupun instansi, sehingga dibutuhkan koordinasi dan kerjasama pihak-pihak terlibat agar implementasi dapat berjalan dengan baik. Maka dalam penelitian ini fragmentasi yang dilakukan oleh para pustakawan sudah berjalan dengan sangat baik para pustakawan melakukan tupoksinya masing-masing dan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing

Faktor Penghambat

Beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh para pelaksana dalam menjalankan program Inovasi Pustaka Anak Bangsa ini yaitu:

1. Kurangnya sumber daya manusia seperti staf dan pegawai di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah serta tidak semua staf atau pegawai merespon positif program ini seperti pola pikir mereka yang masih merasa bahwa ini bukan tanggung jawab mereka dan tidak punya motivasi untuk melakukan ide atau membuat gagasan terkait program Layanan Pustaka Anak Bangsa ini.
2. Terbatasnya anggaran yang diberikan kepada Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah sehingga hal ini berdampak pada fasilitas yang kurang memadai seperti bahan bacaan yang tidak sesuai dengan umur anak-anak di panti.

Penutup

Kesimpulan

Implementasi program layanan inovasi Pustaka Anak Bangsa oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Samarinda telah berjalan, namun belum optimal. Berdasarkan analisis menggunakan teori George C. Edward III, diketahui bahwa:

1. Komunikasi dalam pelaksanaan program sudah cukup efektif, dengan penyampaian informasi yang jelas dan konsisten.
2. Sumber daya masih menjadi kendala utama, baik dari segi SDM, fasilitas mobil pustaka keliling, maupun bahan bacaan yang belum sesuai dengan usia dan minat anak-anak panti.
3. Disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan komitmen yang tinggi, terlihat dari upaya pustakawan dalam menjangkau anak-anak dengan pendekatan personal.
4. Struktur birokrasi telah mendukung pelaksanaan program melalui pembagian tugas dan SOP.

Faktor penghambat Implementasi Program Layanan Inovasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah di Kota Samarinda adalah dari staf pelaksana kebijakan dibandingkan dengan faktor eksternal dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya jumlah sumber daya manusia yang tersedia dan yang berkompeten untuk melaksanakan kebijakan, dan sumber daya anggaran serta peralatan. Secara keseluruhan, program ini merupakan inovasi pelayanan publik yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan literasi anak-anak panti, namun masih membutuhkan perbaikan dalam aspek sumber daya dan pendukung teknis.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan rekomendasi sebagai pelengkap penelitian Implementasi Program Layanan Inovasi Pustaka Anak Bangsa oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah di Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang belum mencukupi dari segi kuantitas mau pun kualitas, pihak pelaksana diharapkan mempertimbangkan upaya seperti melakukan rekrutmen tenaga kerja tambahan sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang relevan. Seperti melakukan redistribusi pegawai yang sudah ada lalu bisa juga mengadakan pelatihan dan pengembangan dengan harapan kualitas pelaksanaan program dapat ditingkatkan.
2. Terkait dengan keterbatasan anggaran ini harapannya pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap alokasi dana bagi layanan inovatif seperti Pustaka Anak Bangsa. Selain itu menetapkan skala prioritas berdasarkan

urgensi dan dampak dari setiap program. Pihak pelaksana juga diharapkannya melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga seperti lembaga swasta dan organisasi masyarakat untuk memperluas dan karena keterbatasan anggaran ini menjadi kurangnya fasilitas sarana seperti bahan bacaan yang tidak sesuai dengan umur para warga binaan diharapkannya pihak pustakawan dapat menambahkan koleksi bahan bacaan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik melalui pengadaan langsung, kerja sama dengan penerbit, atau donasi dari berbagai pihak, seperti alumni instansi pemerintah maupun lembaga swasta selain itu pula diperlukan perencanaan yang lebih matang dalam pengalokasian anggaran untuk sarana dan prasarana agar dana yang tersedia dapat digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Dengan adanya strategi yang terarah, keterbatasan fasilitas pendukung dapat diatasi secara bertahap, sehingga pelaksanaan kebijakan tetap berjalan dengan optimal.

Daftar Pustaka

- Andry, H., Rava Joti. 2022. Pelayanan Perpustakaan Keliling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 8. No 2.
- Dwiyanti, N. 2020 Implementasi Budaya Literasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 9. No 1.
- Dyah dan Erwan. 2012. Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia). Yogyakarta: Gava Media.
- Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik. Gorontalo: UNG Press Gorontalo
- Lestari, P. W., Hanifah Nur Izzah, Mega Kartika Yudyaningtyas. 2021. Peningkatan Minat Baca dengan Program Generasi Masyarakat Gemar Membaca di RPTRA Cililitan Jakarta Timur. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5. No. 1, 106-111.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcesbook. Edisi Ketiga*. New York: SagePublicitions Inc.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
- Rohim, D. C., Septina Rahmawati. Peran Literasi Dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian*, Vol. 6. No. 3.
- Subianto, Agus. 2020. Kebijakan Publik. Surabaya: PT MEnuju Insan Cemerlang.
- Sudiana, N. 2020. Upaya Meningkatkan Minat Baca Siswa Kelas VII SMP Negri 2 Sukasada Tahun Pelajaran 2017/2018 Melalui Gerakan Literasi Sekolah dengan Pocari dan Puding. *Jurnal Of Education Reasearch*, Vol 4. No. 1, 10 16.